

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Barito Kuala (Batola) merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengikuti Pilkada serentak pada Tahun 2017. Untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan sinkronisasi naskah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batola 2005-2025, setiap SKPD dipandang perlu menyusun Naskah Rencana Strategis (Renstra) guna mendukung kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Naskah tersebut disusun paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perda RPJMD.

Rencana Strategis memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perpanjangan tangan dari kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra tersebut disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perda Batola Nomor 03 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Batola Tahun 2005 – 2025 dan Perda



Kab. Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.

Berdasarkan ketentuan di atas, Untuk itu disusunlah Renstra Kecamatan Wanaraya 2017-2022 mengacu pada batas kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Wanaraya tahun 2017-2022 sebagai perwujudan Visi, Misi dan program Kepala Daerah memiliki Konsekuensi bahwa Camat selaku pemangku kewenangan bupati di wilayah kecamatan harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Camat Wanaraya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Wanaraya Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.



28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
30. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/270/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.
31. Surat Keputusan Camat Wanaraya Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tim Penyusunan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Wanaraya

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola Tahun 2017–2022 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, bagian dan pemerintah desa sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2017–2022 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Batola 2017-2022.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola Tahun 2017 – 2022 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:



a. Menjabarkan visi dan misi Camat Wanaraya ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.

d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.

f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam SKPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Kecamatan Wanaraya tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 jo. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut :



**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WANARAYA**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organosasi Kecamatan Wanaraya**
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wanaraya**
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wanaraya**
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wanaraya**

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WANARAYA**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wanaraya**
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
- 3.3 Telaahan K/L dan Renstra Kabupaten Barito Kuala**
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wanaraya**

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP.**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WANARAYA

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Wanaraya

##### 2.1.1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa : **Tugas pokok Kecamatan** adalah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, **Kecamatan mempunyai fungsi**, yaitu :

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa
3. Penyelenggaraan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
6. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat
7. Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
8. Penyelenggaraan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerjanya
10. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
12. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga
13. Pelaksanaan Koordinasi Keluarga Berencana.



Tugas-Tugas dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, meliputi:
  - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.



- Tugas Kecamatan dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
  
- Tugas Kecamatan dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
  - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
  
- Tugas Kecamatan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
  - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.



- Tugas Kecamatan dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
  - a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
  - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
  
- Tugas Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi:
  - a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.



### 2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat
2. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Unsur-unsur organisasi Kecamatan di bawah Camat, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan
  - a. Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
  - b. Tugasnya membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.
  - c. Fungsinya :
    - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan perpustakaan.
    - Penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tata laksana.
    - Penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
  - d. Sekretariat terdiri dari :
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi dan pelayanan kepegawaian di lingkungan kecamatan.



- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan kecamatan.

2. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan Ketertiban.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian, perdagangan dan lingkungan hidup

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, agama, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Wanaraya

Kecamatan Wanaraya merupakan bagian atau salah satu Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Barito Kuala, mempunyai penduduk sebesar 13.496 jiwa dengan luas wilayah 37,50 KM<sup>2</sup> dan merupakan daerah pasang surut yang mempunyai ketinggian ½ (setengah) meter dibawah permukaan laut.

Kecamatan Wanaraya adalah Eks Kecamatan Perwakilan Belawang dan sudah menjadi Kecamatan Defenitif secara resmi 9 April 1995, Wilayah Kecamatan terbagi menjadi 13 Desa.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kecamatan Takisung, Jorong, Pelaihari, Kurau, Bati Bati di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, **Kecamatan Wanaraya**, Tabunganen, Tamban, Anjir Pasar, Anjir Muara, Alalak, Mandastana, Berambai, Cerbon dan Kecamatan Kuripan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras utara, Binuang, Tapin Selatan, Tapin utara, Tapin Tengah dan Kecamatan Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin dan Kecamatan Banua Lawas, Kelua, Tanta, Tanjung, Haruai dan Kecamatan Muara Uya di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Pulau Sembilan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Pulau Sebuku, Kusan Hilir, Satui, Kusan hulu, Batulicin, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan dan Kecamatan Pamukan Utara di Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Baru Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Adapun letak wilayah Kecamatan Wanaraya berada pada :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tabukan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Anjir muara dan Kecamatan Anjir pasar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Berambai dan Kecamatan Belawang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.



Mata pencaharian penduduk Kecamatan Wanaraya sebanyak 5% adalah petani sawah, dan kebun 90 % Pedagang, 5 % Karyawan Industri/pegawai dan lain-lain. Potensi wilayah adalah Pertanian dan Perkebunan, selain penghasil padi, bidang perkebunan yang paling menonjol adalah perkebunan Jeruk,sawit dan getah.

Kecamatan Wanaraya terdiri dari 13 (tigabelas) desa, yaitu :

1. Desa Tumih
2. Desa Roham raya
3. Desa Surya kanta
4. Desa Dwipa sari
5. Desa Sumber rahayu
6. Desa Kolam Makmur
7. Desa Waringin kencana
8. Desa Pinang habang
9. Desa Simpang jaya
10. Desa Kolam kiri
11. Desa Sidomulyo
12. Desa Babat Raya
13. Desa Kolam kanan

Data Kependudukan Kecamatan Wanaraya Per Tanggal 01 Januari 2019,keseluruhan jumlahnya 13.496 jumlah penduduk.

Kecamatan Wanaraya yang terletak di Garis Khatulistiwa, termasuk daerah hujan tipe B yaitu iklim yang mempunyai 1 - 2 bulan kemarau dalam setahun. Temperatur rata - ratanya antara 25 – 27 derajat celcius, dengan suhu maksimum 27,50<sup>0</sup>C (bulan Oktober) dan suhu minimum 26,50<sup>0</sup>C (bulan juli). Sedangkan angka rata - rata hujan setiap tahunnya adalah 2,665 mm dengan 107 hari hujan.

Komitmen rencana yang baik dan dengan dibarengi upaya yang kuat untuk merealisasikannya sangat diperlukan dalam membangun Kecamatan



Wanaraya, mengingat *Kondisi dan potensi Daerah yang serba minim*, serta *Kompleksitas permasalahan yang dihadapi*.

Jika dicermati dari *Aspek Kondisi* dapat dikemukakan secara umum sebagai berikut :

- Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Wanaraya diliputi lahan Rawa Gambut, dengan topografis datar
- dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut, Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi
- Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil.
- Tidak memiliki sumber daya Hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam.
- Tidak memiliki kandungan sumber daya Alam bahan galian/Tambangan yang potensial.
- Infrastruktur menyangkut prasarana jalan sudah lumayan mengingat sebagian besar desa dijalar Jalan poros Banjarmasin dan Marabahan, serta jalan yang sudah beraspal dan batapres dengan demikian seluruh desa sudah terhubung, walaupun demikian masih ada pemukiman masyarakat yang hanya kondisi jalan tanah yang perlu peningkatan dan pemeliharaan berkala.
- Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya.
- Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya pertahunnya.
- Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini juga sekaligus bisa menunjukkan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Sesuai dengan kondisi yang melingkunginya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian disektor pertanian.



- Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan pembangunannya pertahunnya.

Dalam negara kesejahteraan (Welfare state), pemerintah harus mampu mendayagunakan potensi yang ada di daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan akan tetapi tetap juga menjaga kelestariannya.

Melalui sistem agribisnis, proses peningkatan nilai tambah telah berlangsung, utamanya di tingkat kelompok tani antara lain mulai diimplementasikannya sistem waktu produksi Jeruk dan komoditas lainnya dalam usaha skala masyarakat.

Sedangkan untuk kondisi aparatur Kecamatan Wanaraya dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

- Data Pegawai Kantor kecamatan

Untuk jumlah pegawai, jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Kantor Kecamatan Wanaraya**

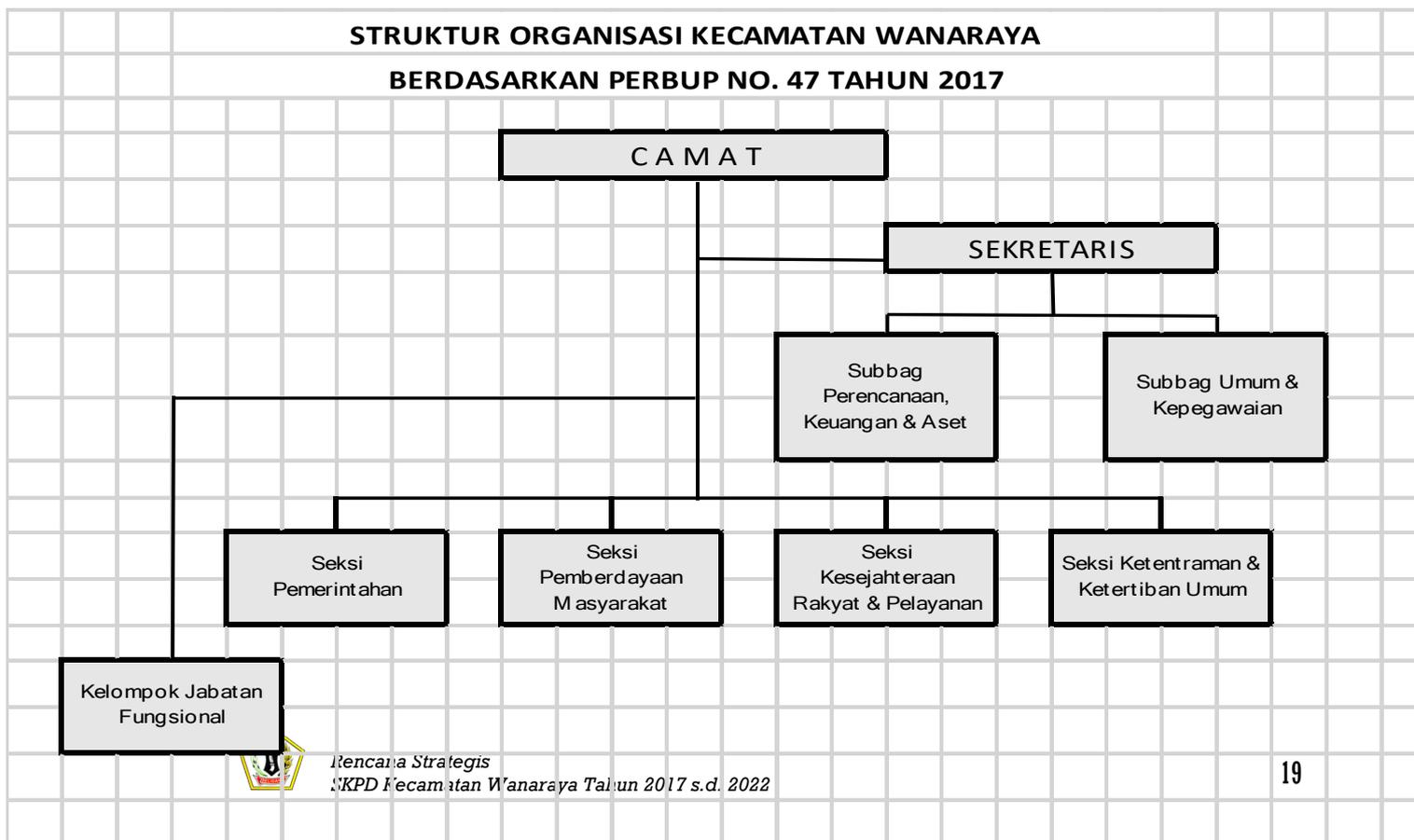
| <b>No.</b> | <b>NAMA</b>           | <b>NIP</b>            | <b>GOL.</b> | <b>JABATAN</b>                           |
|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| (1)        | (2)                   | (3)                   | (4)         | (5)                                      |
| 1          | Joko Sumitro,S.Sos.MA | 19690610 199003 1 005 | IV/a        | Camat                                    |
| 2          | Dodie wahyo P.SE      | 19821224 198503 1 004 | III/c       | Sekretaris Camat                         |
| 3          | Abdul muin,S.Sos      | 19671223 198803 1 008 | III/c       | Kasi Pemerintahan                        |
| 4          | H.Rujimansyah         | 196328 198603 1 018   | III/d       | Kasi Pemb. Masyarakat                    |
| 5          | H.Hasan.S.Pd          | 19620315 198303 1 016 | III/d       | Kasi Kesra dan Pelayanan                 |
| 6          | Untung Subagyo        | 19641204 198503 1 004 | III/b       | Kasi Trantibum                           |
| 7          | Sapwani,A.Md          | 19780303 201001 1 014 | III/a       | Kasubbag Perencanaan,<br>Keuangan & Aset |
| 8          | Risty widayanti,S.Sos | 19820220 201301 2 002 | III/a       | Kasubbag Umum dan                        |



|    |                      |                        |      |                                |
|----|----------------------|------------------------|------|--------------------------------|
|    |                      |                        |      | Kepegawaian                    |
| 9  | Norlaila Iriani      | 19771226 2007012 2 010 | II/c | Bendahara Pengeluaran          |
| 10 | Sutardi Adi Sugiaono | 19760118 200103 1 001  | II/c | Bendahara Barang               |
| 11 | Rahman Rizky         | 19820711 201001 1 021  | II/c | Bendahara Penerimaan           |
| 12 | Alviani              | 19820403 200701 1 004  | II/d | Pembantu Bendahara barang      |
| 13 | Akhmad Rusman        | 19720728 200701 1 023  | II/d | Petugas Keamanan               |
| 14 | Sunarno              | 19670513 200701 1 024  | II/d | Pengadaan sarana dan prasarana |
| 15 | Yahmo                | 19700415 200906 1 007  | II/c | Petugas Keamanan               |
| 16 | Abdul Syahid         | 19710705 200906 1 008  | II/c | Pengadaan sarana dan prasarana |
| 17 | Nengah Sita          | 19720308 200906 1 005  | II/b | Pengadaan sarana dan prasarana |
| 18 | A.Umar               | 19650912 200701 1 038  | II/d | Kepala Desa                    |

b. Struktur Organisasi Kecamatan

**Tabel 1.2**  
**Struktur Organisasi Kecamatan**



## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wanaraya

Kinerja Kecamatan Wanaraya memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala.yang meliputi:

1. Pelayanan Perizinan meliputi:
  - a. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil.
  - b. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan skala kecil.
2. Pelayanan Non Perizinan meliputi:
  - a. Pelayanan KTP,
  - b. Surat Pindah Antar Desa , Antar Kecamatan,
  - c. Rekomendasi Surat Tidak mampu,
  - d. Surat dispensasi Nikah,
  - e. Rekomendasi pencairan ADD dan DD,
  - f. Register Surat Tanah.
  - g. Surat Keterangan Usaha
  - h. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Sedangkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Wanaraya selama tahun 2017 pada sekretariat masing-masing sub bagian dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada sekretariat**

#### **1) Capaian program pelayanan administrasi perkantoran**

- Tunjangan hasil capaian, terbayarnya Tunjangan Daerah pegawai Kecamatan Wanaraya.
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian, terfasilitasinya pelayanan surat menyurat.
- Kegiatan Penyediaan jasanya sumber daya air dan listrik hasil capaian,tersedianya layanan, air bersih dan listrik.



- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional hasil capaian, terpenuhinya layanan pajak kendaraan dinas.
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dengan hasil capaian yakni terpeliharanya kebersihan kantor.
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian terpenuhinya keperluan alat tulis kantor kecamatan
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya cetak keperluan kantor dan penggandaan berkas atau dokumen lainnya.
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dengan capaian terpenuhinya perlengkapan instalasi listrik kantor.
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian terpenuhinya langganan bahan bacaan Koran
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan capaian tersedianya makan dan minum rapat, harian dan rapat koordinasi di kantor Kecamatan Wanaraya
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah.

## **2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional dengan tersedianya biaya Pengadaan Kendaraan dinas untuk kelancaran Operasional Kecamatan
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor untuk operasionalisasi di kantor Kecamatan
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yakni terbayarnya jasa pemeliharaan/ jaga malam selama 1 tahun



- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional yakni terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 9 unit.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 4 buah.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor dengan capaian terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 7 buah

### **3) Capaian Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan dengan capaian telah di ikutinya bimtek sebanyak 3 kali.

## **b. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Trantib**

### **4) Capaian Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

- Kegiatan Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan capaian Terjaganya keamanan secara Kondusif wilayah Kecamatan Wanaraya.

## **c. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Pemerintahan**

### **5) Capaian Program Peran Serta Kepemudaan**

- Pelaksanaan pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus dengan capaian telatuhnya 26 orang anggota paskibraka tingkat kecamatan.

## **d. Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

### **6) Capaian Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah**

- Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah dengan capaian telah dikutinya pameran pembangunan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala



**7) Capaian Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**

- Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan capaian tersuluhnya 200 orang ibu-ibu rumah tangga dan perempuan

**8) Capaian Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa**

- Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes dengan capaian di monitoring dan di evaluasinya laporan APDes pada 13 desa.
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian pelaksanaan APBDes dengan Capaian Jumlah Desa yang di Monitoring dan di evaluasi sebanyak 13 Desa
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tertib Administrasi di kelurahan dan Pemerintahan Desa dengan capaian Jumlah desa dengan Administrasi Desa yang baik sebanyak 13 Desa

**9) Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan hasil capaian, memberikan Partisipasi Kepada Masyarakat untuk bermusyawarah dalam Pembangunan Daerah Pembangunan Desa.

**e).Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan**

**10) Capaian Program Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama**

- Kegiatan MTQ Tingkat kabupaten dengan capaian terkirimnya 40 orang kafilah dari Kecamatan Wanaraya.





Tabel. 2.1. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala

| No  | Indikator kinerja sesuai Tupoksi (IKU)             | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun ke- |      |      |      |      | Realisasi capaian tahun ke- |       |      |      |      | Rasio capaian pada tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|-------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|     |  |             |            |                          | 2018                     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018                        | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2018                         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2)  | (3)         | (4)        | (5)                      | (6)                      | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11)                        | (12)  | (13) | (14) | (15) | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1.  | Indek Kepuasan Masyarakat                          | 0           | 0          |                          | 81                       | 82   | 83   | 84   | 85   | 81,05                       | 82,25 | 0    | 0    | 0    | 100                          | 100  | 0    | 0    | 0    |
| 2.  | Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik | 0           | 0          |                          | 100                      | 100  | 100  | 100  | 100  | 98                          | 98    | 0    | 0    | 0    | 98                           | 98   | 0    | 0    | 0    |



Tabel. 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wanaraya  
Kabupaten Barito Kuala

| Uraian   | Anggaran pada Tahun Ke-<br>(Rp 000) |                 |                 |                 |                 | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp) |                 |                 |                 |                 | Rasio antara Realisasi dan Anggaran<br>Tahun Ke- (%) |       |       |       |       | Rata-rata<br>Pertumbuhan |           |
|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-----------|
|  | 2018                                | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2018                                   | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | Anggaran                 | Realisasi |
| (1)  | (2)                                 | (3)             | (4)             | (5)             | (6)             | (7)                                    | (8)             | (9)             | (10)            | (11)            | (12)   | (13)  | (14)  | (15)  | (16)  | (17)                     | (18)      |
| Kinerja Utama 1                                    |                                     |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |  |       |       |       |       |                          |           |
| Indek Kepuasan Masyarakat                          | 109.607.00<br>0                     | 144.110.00<br>0 | 112.163.00<br>0 | 116.150.00<br>0 | 117.082.00<br>0 | 109.607.00<br>0                        | 142.410.00<br>0 | 112.163.00<br>0 | 116.150.00<br>0 | 117.082.00<br>0 | 84,91  | 85,12 | 91,04 | 89,91 | 85,33 | 142.410.00<br>0          | 84,77 %   |
| Kinerja Utama 2                                    |                                     |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |  |       |       |       |       |                          |           |
| Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik | 109.607.00<br>0                     | 33.363.00<br>0  | 112.163.00<br>0 | 116.150.00<br>0 | 117.082.00<br>0 | 109.607.00<br>0                        | 32.935.92<br>0  | 112.163.00<br>0 | 116.150.00<br>0 | 117.082.00<br>0 | 98,00  | 98,00 | 0     | 0     | 0     | 32.935.92<br>0           | 78,11 %   |



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wanaraya

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Wanaraya diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

### A. Kekuatan

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat
- Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, tetapi sudah sangat membantu dalam pelaksanaan tugas.
- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas serta struktur organisasi yang terpola dan memiliki kekuatan hukum dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku
- Adanya prosedur dan mekanisme perencanaan yang jelas
- Lingkungan dan suasana kerja di Kecamatan Wanaraya yang kondusif, melalui hubungan kerja yang terbentuk dan dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam pengembangan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*)
- Ketersediaan sarana informasi berbasis teknologi (IT) yang dapat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi dari luar melalui telepon dan internet.



## **B. Kelemahan**

- Kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
- Kurangnya sarana dan prasarana baik dari kualitas dan kuantitas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam rangka penciptaan pelayanan publik yang baik
- Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran dan tupoksi yang dimiliki kecamatan hanya sebagai koordinator.
- Paradigma pelayanan publik yang belum terstandarisasi dan berakibat munculnya pesimisme masyarakat terhadap terciptanya pelayanan publik yang baik.

## **C. Tantangan**

- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial di tingkat regional, nasional maupun global merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan wilayah
- Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahanan desa/kelurahan
- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat



- Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis.
- Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum yang salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- Income perkapita masyarakat masih rendah
- Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah

#### **D. Peluang**

- Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/lembaga/stakeholder kepada Kecamatan Wanaraya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan serta menjawab tantangan dan permasalahan di masa datang.
- Adanya aspirasi, apresiasi dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan.
- Ketersediaan dana APBN, APBD dan anggaran lintas SKPD untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan mendorong perkembangan perekonomian penyelenggaraan pembangunan infrastruktur wilayah.
- Karakteristik masyarakat yang terbuka, dinamis dan agamis serta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam
- Iklim globalisasi, perkembangan Iptek dan ketersediaan potensi sumber daya manusia yang cukup banyak sebagai salah satu komponen dan modal dasar pelaksanaan pembangunan
- Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WANARAYA**

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Wanaraya saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Renstra SKPD berikutnya.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wanaraya**

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Wanaraya perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Wanaraya adalah :

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
- d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- f. Masih terdapat jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
- g. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- h. Keberadaan pusat pemerintahan atau pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.



Adapun Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain begitu pula dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik kecamatan hanya merencanakan sedangkan yang melaksanakan SKPD lain. Jadi kecamatan hanya melaksanakan pelayanan administrasi/kegiatan administrasi.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Wanaraya permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan.

Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah kurangnya pembinaan terhadap pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya pembinaan aparatur, kelembagaan dan pembinaan administrasi sebagai pendukung kegiatan.

## **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

### **3.2.1 VISI**

Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah :



**“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa  
Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”**

**Makna Kata Pada Visi :**

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola pikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemimpin menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola pikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola pikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.



## **Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi**

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

**Satu Kata Satu Rasa**, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten “SELIDAH” tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

**Membangun Desa**, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.



**Menata Kota**, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kualadan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang ‘BAHALAP’ yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

### **1.1. Misi**

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani



## **Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi**

### **1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kot**

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

### **2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian**

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.



### **3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia**

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahanda hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementerian Agama, lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlakul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.



#### 4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan “*e-Planning and e-Budgeting*“, *e-DataBase*” serta “*e-Evaluating*”. Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.



**Tabel 3.1.**  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah  
RPJMD 2017 – 2022 Kab. Barito Kuala

**VISI :“TERWUJUDNYABARITO KUALA SATU KATA SATU RASA, UNTUK MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA)”**

| tujuan   | Indikator  | Sasaran  | Indikator Kinerja   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Misi I. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandiri-an Desa dan Penataan Kota</b>   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tujuan 1.</b><br>Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk<br><br>Persentase areal kawasan kumuh | Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman | 1. Persentase panjang jalan kondisi baik  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Persentase luas wilayah irigasi kondisi baik   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Persentase lingkungan permukiman kumuh   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Cakupan layanan telekomunikasi   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Persentase backlog   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Luasan RTH public  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Persentase penduduk berakses air minum   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Persentase rumah tinggal bersanitasi   |  |  |  |  |  |  |
|  | Indeks Kualitas Lingkungan   | Meningkatnya kualitas lingkungan   | 9. Indkes Kualitas Lingkungan   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Misi II. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian</b>  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tujuan 2.</b><br>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya                                     | Pertumbuhan ekonomi  | Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian   | 10. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan terhadap PDRB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat                        | 11. Indeks Gini   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. PDRB per kapita   |  |  |  |  |  |  |



|  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Meningkatnya pendapatan daerah dan realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal | 13. Persentase peningkatan PAD pajak dan retsibusi daerah |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   | 14. Persentase pertumbuhan investasi                      |  |  |  |  |  |  |  |

**Misi III. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia**

|   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Tujuan 3.</b><br>Meningaktkkan kualitas sumebrdaya manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  | Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat | 15. Angka Harapan Sekolah                  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | 16. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | 17. Persentase lulusan SD khatam Al-Qur'an |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | 18. Usia Harapan Hidup (UHH)               |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya |   |  | 19. Persentase organisasi pemuda berwirausaha |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  | 20. Jumlah perolehan medali bidang olah raga  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  | 21. Situs cagar budaya yang dilestarikan      |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  | 22. Indeks Kota Layah Anak (KLA)              |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  | 23. Angka Kelahiran Kasar                     |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  | 24. Tingkat pengangguran                      |  |  |  |  |  |  |  |

|    |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | 1. |  | 25. Tingkat pengangguran |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |  | 26. Tingkat kemiskinan   |  |  |  |  |  |  |  |

**Misi IV. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani**

|   |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Tujuan 4.</b><br>Meningaktkkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. | Opini BPK | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah | 27. Persentase perencanaan pembangunan Peranhkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD |  |  |  |  |  |  |  |
|   |           |   | 28. Indeks Reformasi Birokrasi   |  |  |  |  |  |  |  |



### 3.3 Telaahan Renstra Kabupaten Barito Kuala

Strategis pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan strategi untuk mencapai tujuan.

#### STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN :

**“SA”, SATU SINERGITAS USAHA BERDAYA SAING YANG  
DITUMBUHKEMBANGKAN MELALUI PENINGKATAN  
PEREKONOMIAN BERBASIS PERTANIAN INOVATIF.**

#### Sasaran 1.

Terwujudnya peningkatan intensitas kegiatan perekonomian masyarakat yang semakin berdaya saing, yang diindikasikan bertambahnya jumlah serta jenis usaha, posisi tawar produk dan mandiri lembaga usaha masyarakat yang mendukung pendapatannya.

#### Strategi :

Peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi

#### Sasaran 2.

Terwujudnya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian inovatif yang semakin ke hilir yang diindikasikan bertambahnya luas lahan usaha, ragam diversifikasi, produksi, posisi tawar komoditas yang bernilai tambah, yang mendukung kemampuan berketahanan pangan.

**Strategi :**

- a. Mewujudkan pertanian berkelanjutan
- b. Mewujudkan pemanfaatan secara optimal potensi perikanan dan kelautan
- c. Mendorong peningkatan produktivitas peternakan yang unggul dan berkualitas.
- d. Mewujudkan pemanfaatan hasil hutan rakyat secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas
- e. Mengoptimalkan sumberdaya alam

**“MA”, MASYARAKAT CERDAS, SEHAT DAN BERTAQWA YANG  
DIWUJUDKAN DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA  
MANUSIA.**

**Sasaran 3.**

Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang profesional, terjangkau, merata dan berkualitas yang diindikasikan kompetensi masyarakat yang semakin beriman, bertaqwa, unggul, mampu bersaing dan memiliki semangat untuk berubah lebih baik

**Strategi :**

- a. Peningkatan Akses Pendidikan
- b. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- c. Peningkatan Mutu Pendidikan

**Sasaran 4.**

Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mudah, murah, merata serta memadai yang diindikasikan semakin mampu, berdaya dan mandiri masyarakat dalam berpola hidup bersih dan sehat.



**Strategi :**

- a. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
- b. Percepatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan

**“RA”, RASA AMAN DAN ADIL, YANG DIPENUHI DENGAN  
PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN DAN PENCIPTAAN  
TATA KEHIDUPAN SOSIAL YANG BAIK.**

**Sasaran 5.**

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepuasan, rasa aman dan adil.

**Strategi :**

- a. Penyelenggaraan tertib pengadministrasian kependudukan
- b. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
- c. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- d. Pembinaan kesadaran kehidupan berpolitik yang demokratis
- e. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
- f. Pemantapan reformasi birokrasi
- g. Peningkatan layanan kepada masyarakat
- h. Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai dan upaya pemerataan pegawai daerah
- i. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
- j. Penguatan kompetensi pemerintahan desa
- k. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur dan masyarakat di bidang hukum
- l. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
- m. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel



- n. Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informasi
- o. Meningkatkan manajemen data dan informasi pembangunan daerah
- p. Peningkatan pengelolaan pertanahan

#### **Sasaran 6.**

Terwujudnya pemenuhan hak sosial masyarakat, berupa jaminan, pelayanan, kesempatan dan perlindungan yang diindikasikan martabat masyarakat semakin baik, memiliki keberdayaan, kebanggaan sehingga mampu mendukung terbentuknya rasa cinta tanah air dan hidup dalam lingkungan keluarga bahagia.

#### **Strategi :**

- a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat terpencil dan penyandang cacat.
- b. Peningkatan kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak.
- c. Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana dan Bina Keluarga Balita
- d. Meningkatkan kebudayaan dan kesenian serta mempromosikan kebudayaan daerah.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan serta kepeloporan pemuda
- f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan olahraga
- g. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan
- h. Memasarkan obyek wisata
- i. Peningkatan pengembangan transmigrasi

### **“SA”, SARANA DAN PRASARANA WILAYAH YANG DITINGKATKAN MELALUI PERBAIKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNANNYA.**

#### **Sasaran 7.**

Terwujudnya kemudahan mobilitas dalam beraktivitas usaha dan kegiatan lainnya yang diindikasikan semakin terpenuhi dan tersedianya secara memadai sarana dan prasarana wilayah, berupa jalan dan jembatan, yang menghubungkan sentra usaha masyarakat di pedesaan dan perkotaan.



**Strategi :**

Peningkatan jumlah jalan dan jembatan dengan kondisi baik

Pembangunan moda transportasi umum

**Sasaran 8.**

Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan masyarakat yang sehat, memadai yang diindikasikan semakin terpenuhinya kebutuhan air bersih, sanitasi, jalan permukiman, perumahan beserta ruang lingkungan yang mendukungnya.

- a. Pemenuhan kebutuhan air bersih
- b. Pengelolaan sistem sanitasi yang baik.
- c. Pemantauan kondisi lingkungan
- d. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam kepemilikan rumah sederhana dan sehat.
- e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Komitmen rencana yang baik dan dengan dibarengi upaya yang kuat untuk merealisasikannya sangat diperlukan dalam membangun Kecamatan Wanaraya, mengingat *Kondisi dan potensi Daerah yang serba minim*, serta *Kompleksitas permasalahan yang dihadapi*.

Jika dicermati dari *Aspek Kondisi* dapat dikemukakan secara umum sebagai berikut :

- Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Wanaraya diliputi lahan Rawa Gambut, dengan topografi datar
- dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut, Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi
- Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil.
- Tidak memiliki sumber daya Hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam.
- Tidak memiliki kandungan sumber daya Alam bahan galian/Tambangan yang potensial.



- Infrastruktur menyangkut prasarana jalan sudah lumayan mengingat sebagian besar jalan desa dan jalan poros menuju Banjarmasin dan Marabahan sudah beraspal, dengan demikian seluruh desa sudah terhubung, walaupun masih ada pemukiman masyarakat yang hanya kondisi jalan tanah yang perlu peningkatan dan pemeliharaan berkala.
- Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya.
- Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya pertahunnya.
- Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini juga sekaligus bisa menunjukkan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum termanfaatkan secara optimal.
- Sesuai dengan kondisi yang melingkunginya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian disektor pertanian.
- Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan pembangunannya pertahunnya.

Melalui sistem agribisnis, proses peningkatan nilai tambah telah berlangsung, utamanya di tingkat kelompok tani antara lain mulai diimplementasikannya sistem ternak burung puyuh dan kolam ikan lokal serta komoditas lainnya dalam usaha skala masyarakat serta pembukaan lahan kelapa sawit yang menjadi prioritas serta penanaman cabe hijau sebagai komoditas tambahan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa



yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kecamatan Wanaraya yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan kabupaten Barito Kuala, antara lain sebagai berikut.

➤ **Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik**

- Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kecamatan Wanaraya sebagai agen pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kecamatan memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya.
- Permasalahan penyelenggaraan umum pemerintahan menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pengembangan aparatur. Secara umum permasalahan yang terkait pemerintahan umum dan pelayanan publik ditandai dengan:
  - a) Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
  - b) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.



- c) Masih rendahnya tingkat pelayanan kepada masyarakat melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
- d) Masih rendahnya persentase desa dengan administrasi desa yang baik



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

*Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah dan masyarakat harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.* Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah bersama masyarakat.

Titik Awal Rencana Strategis Pembangunan Daerah dimulai dari *Visi* yang menjadi kristalisasi komitmen bersama (seia sekata/selidah) dan merupakan pernyataan arah bagi penentuan setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah. Dalam pewujudan hal tersebut Kecamatan Wanaraya harus mengacu pada visi dan misi yang diusung oleh Bupati terpilih Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 yang menjadi acuan dalam pola dan kerangka berpikir kecamatan dalam menentukan renstra.

Adapun untuk Visi dan Misi Bupati terpilih Kab. Batola Tahun 2017-2022 Adalah sebagai berikut :

### ***VISI***

Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Membangun Desa  
Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera

### ***MISI***

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani .



Berdasarkan visi dan misi diatas, terdapat beberapa kesinergian masing-masing SKPD dilingkup Kab. Batola untuk mewujudkannya, adapun untuk seluruh kecamatan diprioritaskan untuk memilih Misi program no 4 (Empat) yakni : “Memantapkan Tata Kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani.

Dengan mengacu pada batasan tersebut di atas “*Visi Kecamatan Wanaraya 2017-2022*” dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN KECAMATAN WANARAYA YANG MANDIRI DAN MELAYANI”**

Dari pernyataan *Visi* di atas ada **dua kata kunci** yang harus memerlukan penekanan untuk diwujudkan Pemerintah Kecamatan Wanaraya guna meningkatkan kemampuan kecamatan sampai tahun 2017, yaitu :

**Pertama** “**MANDIRI**”

**Kedua** “**MELAYANI**”

Uraian penjelasan pernyataan Visi berdasarkan kedua kata kunci tersebut, adalah sebagai berikut :

**a. Mandiri**

Kondisi masyarakat saat ini mengharapkan agar para pelaksana di Negara ini termasuk di Kabupaten Barito kuala benar benar melaksana tugas yang diemban atau dengan kata lain tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga masyarakat benar benar merasa terlayani dan terayomi. Dengan kondisi demikian tidak ada lagi tudingan masyarakat yang negative pada penyelenggara pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan tetapi mampu bersinergi sehingga apa yang diharapkan masyarakat yang maju dan berdaya saing tinggi menuju terciptanya kemandirian daerah akan terpenuhi serta mendapat restu dan ridha dari Allah SWT.



## **b. Melayani**

Dengan kondisi dan tuntutan reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan keadilan yang hakiki, menyeluruh dan komprehensif dalam hal pelayanan yang efektif dan efisien sehingga kesetaraan dalam pelayanan dapat diwujudkan dengan baik. Masyarakat tidak lagi menunggu lama dan output yang dihasilkan pun tepat sasaran.

## **MISI**

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, dengan mengakomodasikan berbagai “ **input** ” dipadukan dinamika lingkungan sesuai tuntutan masyarakat dirumuskan “ **Misi** ” sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Wanaraya secara bertahap, sistematis dan terintegrasi. *Misi sebagai pernyataan cita-cita, memberikan arahan yang jelas tentang apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.*

Mengacu pada visi Kecamatan Wanaraya dan tujuan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang tercantum dalam RPJMD, maka misi Kecamatan Wanaraya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja
- b. Mewujudkan peningkatan tertib administrasi desa

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wanaraya**

#### **1. Tujuan dan Indikator Tujuan**

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Meningkatnya Tertib administrasi Desa dengan inikator tujuan Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik



## 2. Sasaran dan indikator Kinerja Utama

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai dari Kecamatan Wanaraya periode 2017–2022 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator utama Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Pesentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik



**Tabel 4.1**  
**Tujuan , Indikator dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraya**  
**ESELON III**

| No | Tujuan  | Indikator  | Target Tujuan |      |      |      |      | Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan 2020                          | Sasaran  | Indikator   | Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran                              | Target Sasaran ( % ) |      |      |      |      |
|----|---|--|---------------|------|------|------|------|--|--|---|--|----------------------|------|------|------|------|
|    |   |  | 2018          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |   |  | 2018                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja. | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat .  | 81            | 82   | 83   | 84   | 85   | SKM Unit Pelayanan X 25  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.              | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat .                       | SKM Unit Pelayanan X 25  | 81                   | 82   | 83   | 84   | 85   |
| 2  | Meningkatnya Tertib Administrasi Desa             | 2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik ( Indeks Reformasi Birokrasi ) | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 % | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | 2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik | Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 % | 100                  | 100  | 100  | 100  | 100  |



**TABEL 4.2**  
**SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN KECAMATAN WANARAYA TAHUN 2018- 2022**  
**( PEJABAT ESELON IV )**

| No | Tujuan  | Indikator                  | Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan | Sasaran                                  | Indikator   | Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran | Target Sasaran (%) |      |      |      |      |
|----|---|----------------------------|--|--|---|---|--------------------|------|------|------|------|
|    |   |                            |  |  |   |   | 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja. | Indeks Kepuasan Masyarakat | SKM Unit Pelayanan X 25                | Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat | Nilai Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP | SKM Unit Pelayanan X 25                 | 81                 | 82   | 83   | 84   | 85   |
| 2  |   |                            |  |  | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina               | Realisasi /Target x 100%                | 2                  | 2    | 2    | 2    | 2    |



|   |                                       |  |  |   |  |   |    |    |    |    |    |
|---|---------------------------------------|--|--|---|--|---|----|----|----|----|----|
|   |                                       |  |  | Meningkatnya ketentraman dan Keteriban diKecamatan Wanaraya | Jumlah penegakan Perda yang dilaksanakan                           | Realisasi /Target x 100%  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
|   |                                       |  |  |   | Jumlah Poskamling yang aktif                                       | Jumlah Poskamling yang aktif /Jumlah Poskamling yang terdata x 100% | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | Meningkatnya Tertib Administrasi Desa | Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik | Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik | Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa                     | Jumlah Desa dengan administrasi bidang Pemerintahan Desa yang baik | Realisasi /Target x 100%  | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 |
|   |                                       |  |  | Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan       | Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih                              | Realisasi /Target x 100%  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|   |                                       |  |  |   | Jumlah Peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti           | Realisasi /Target x 100%  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |



|  |  |  |   |   |                          |     |     |     |     |     |
|--|--|--|---|---|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |  |  | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penyusunan APBDes | Jumlah Desa dengan Dokumen Perencanaan yang benar dan tepat waktu | Realisasi /Target x 100% | 10  | 10  | 12  | 12  | 13  |
|  |  |  |   | Jumlah desa yang menyusun APBdesa dengan dan tepat waktu          | Realisasi /Target x 100% | 10  | 10  | 12  | 12  | 13  |
|  |  |  |   | Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang di bina                          | Realisasi /Target x 100% | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|  |  |  | Meningkatnya Peran Serta Wanita Dalam Kesetaraan Gender         | Jumlah Kelompok wanita yang aktif dalam kesetaraan Gender         | Realisasi /Target x 100% | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Wanaraya. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Wanaraya Tahun 2017–2022 sesuai dengan misi Kabupaten Barito Kuala disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| VISI Kabupaten Barito Kuala 2017-2022   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara) |  |   |  |
| MISI :<br>Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani (4)  |  |   |  |
| TUJUAN  | SASARAN  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   |
| Meningkatnya pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik               | Mengoptimalkan sistem dan fasilitasi dalam pelayanan umum kepada Masyarakat                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan public.</li> <li>- Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi lintas sector Kecamatan</li> </ul> |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Desa   | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Mengoptimalkan fasilitasi yang ada di Kecamatan dalam Pengendalian dan pembinaan Desa di Kecamatan Wanaraya | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan Desa.</li> <li>- Peningkatan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan.</li> </ul>      |



### **a. Strategi**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi desa
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan pada setiap desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor pada daerah kecamatan.

### **b. Arah Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Wanaraya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah
3. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan Desa
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor kecamatan

Keterkaitan antara visi dan misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama, serta strategi dan arah kebijakan akan diuraikan pada tabel 5.1 pada lampiran ini



Tabel 5.2

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target dan Kinerja Kecamatan Wanaraya

| VISI   | MISI   | TUJUAN  | SASARAN  | Target Tujuan |        |        |        |        | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN     | Kondisi Awal | Target Sasaran pada Tahun ke- |        |        |        |        |
|--|--|---|--|---------------|--------|--------|--------|--------|--|------------|--------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|  |  |   |  | 1 2018        | 2 2019 | 3 2020 | 4 2021 | 5 2022 |  |            |              | 1 2018                        | 2 2019 | 3 2020 | 4 2021 | 5 2022 |
| Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara) | Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani | 1. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja | 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                | 82            | 82     | 83     | 84     | 85     | 1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat                          | Nilai      | 81           | 82                            | 82     | 83     | 84     | 85     |
|  |  | 2. Meningkatkan Tertib Administrasi Desa            | 2. Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa. | 100           | 100    | 100    | 100    | 100    | 2. 1. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik | Persentase | 0            | 100                           | 100    | 100    | 100    | 100    |



**Tabel 5.3**  
**TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WANARAYA 2017 – 2022**

| TUJUAN  | INDIKATOR TUJUAN             | SASARAN                                 | INDIKATOR SASARAN            | SASARAN PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | KONDISI AWAL | T A R G E T |      |      |      |      |
|---|------------------------------|---|------------------------------|---|---|--------------|-------------|------|------|------|------|
|   |                              |   |                              |   |   | 2017         | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja. | Indeks Kepuasan Masyarakat . | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. | Indeks Kepuasan Masyarakat . | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat                      | 1. Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP | 81           | 81          | 82   | 83   | 84   | 85   |
|   |                              |   |                              |   | 2. Jumlah PMKS yang ditangani di kecamatan                                      | -            | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    |
|   |                              |   |                              |   | 3. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina                    | 0            | 2           | 2    | 2    | 2    | 2    |
|   |                              |   |                              | Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Wanaraya | 1. Jumlah penegakan Perda yang dilaksanakan                                     | 0            | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    |



|                                       |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                       |   |   |   |   | 2. Persentase PosKamling Yang aktif                                   | 0   | 81  | 82  | 83  | 83  | 83  |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Desa | Persentase Desa dengan Administrasi desa yang baik. | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa. | Persentase Desa dengan Administrasi desa yang baik. | Meningkatnya kualitas administrasi desa                         | 1. Jumlah desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik | 0   | 10  | 12  | 12  | 13  | 13  |
|                                       |   |   |   | Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan           | 2. Jumlah Peserta Paskibra yang dilatih                               | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |
|                                       |   |   |   |   | 3. Jumlah Peserta Karang taruna yang mengikuti kemah bhakti           | 0   | 0   | 10  | 10  | 10  | 10  |
|                                       |   |   |   | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penyusunan APBDes | 4. Jumlah desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu  | 0   | 10  | 12  | 12  | 13  | 13  |
|                                       |   |   |   |   | 3. Jumlah desa yang menyusun APBdesa dengan dan tepat waktu           | 0   | 10  | 12  | 12  | 13  | 13  |
|                                       |   |   |   |   | 5. Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina                            | 0   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                       |   |   |   | Meningkatnya Peran Serta Wanita dalam Kesetaraan Gender         | 4. Jumlah kelompok wanita yang aktif dalam kesetaraan gender          | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Program SKPD Kecamatan Wanaraya merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Batola Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Wanaraya selama lima tahun ke depan yakni tahun 2017 – 2022 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Terwujudnya visi SKPD Kecamatan diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Batola lima tahun ke depan sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Batola yakni tahun 2017- 2022.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun program-program SKPD Kecamatan Wanaraya untuk periode lima tahun kedepan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (imfact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.



Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja harus jelas dan terukur. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan ketidak berhasilan atau kinerja dari kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau program akan lebih terarah, dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja SKPD Kecamatan Wanaraya berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 29 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan. Dimana disebutkan bahwa pada unit kerja setingkat eselon II/ SKPD/ unit kerja mandiri, pengukuran kinerja sekurang kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran (output). Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Wanaraya disusun berdasarkan indikator kinerja keluaran (output).

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola SKPD Kecamatan Wanaraya. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh SKPD Kecamatan yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Batola. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif SKPD Kecamatan Wanaraya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Wanaraya disajikan dalam Tabel 6.1 ( Tabel T.C 27 )



**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN WANARAYA**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

| TUJUAN                                | SASARAN                                | KODE              | PROGRAM DAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                       |  |                   |  |  |  | 2018  |                    | 2019          |                    | 2020          |                    | 2021          |                    | Target        |
|                                       |  |                   |  |  |  | Target  | Rp.                | Target        | Rp.                | Target        | Rp.                | Target        | Rp.                |               |
| Meningkatkan kinerja pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | <b>4.01.17.01</b> | <b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>                      | <b>Terciptanya optimalisasi pelayanan publik</b>                           |  | <b>19,920</b>                                 | <b>124,555,050</b> | <b>16,869</b> | <b>151,118,800</b> | <b>16,872</b> | <b>166,230,680</b> | <b>16,873</b> | <b>182,853,748</b> | <b>16,873</b> |
|                                       |  | 4.01.17.01.01     | Penyediaan jasa surat menyurat   | Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola                                |  | 328   | 11,364,000         | 300           | 11,280,000         | 300           | 12,408,000         | 300           | 13,648,800         | 300           |
|                                       |  | 4.01.17.01.02     | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Jumlah langganan listrik, air PDAM dan telepon                             |  | 12  | 14,400,000         | 12            | 19,230,000         | 12            | 21,153,000         | 12            | 23,268,300         |               |
|                                       |  | 4.01.17.01.06     | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah pajak STNK mobil dan sepeda motor dinas yang dibayar (buah)         |  | 6   | 2,600,000          | 7             | 2,800,000          | 8             | 3,080,000          | 9             | 3,388,000          |               |
|                                       |  | 4.01.17.01.08     | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan yang disediakan               |  | 252   | 11,520,000         | 252           | 11,520,000         | 252           | 12,672,000         | 252           | 13,939,200         | 252           |
|                                       |  | 4.01.17.01.10     | Penyediaan alat tulis kantor   | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan                                   |  | 30  | 11,553,800         | 30            | 12,970,500         | 30            | 14,267,550         | 30            | 15,694,305         |               |
|                                       |  | 4.01.17.01.11     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                      |  | 14,225  | 3,556,250          | 11,001        | 3,300,300          | 11,001        | 3,630,330          | 11,001        | 3,993,363          | 11,001        |
|                                       |  | 4.01.17.01.12     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor                 |  | 2   | 1,660,000          | 2             | 1,690,000          | 4             | 1,859,000          | 4             | 2,044,900          |               |
|                                       |  | 4.01.17.01.15     | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Jumlah langganan surat kabar/media cetak                                   |  | 1   | 1,140,000          | 1             | 1,140,000          | 1             | 1,254,000          | 1             | 1,379,400          |               |



|  |                   |  |  |   |            |                   |            |                    |            |                    |            |                    |          |
|--|-------------------|--|--|---|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------|
|  | 4.01.17.01.17     | Penyediaan makan dan minuman                             | Jumlah porsi makanan minuman harian pegawai, tamu dan rapat                                    |   | 4,790      | 28,966,000        | 4,790      | 28,966,000         | 4,790      | 31,862,600         | 4,790      | 35,048,860         | 4,7      |
|  | 4.01.17.01.18     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah     | Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi keluar daerah                                 |   | 16         | 17,347,000        | 18         | 31,470,000         | 18         | 34,617,000         | 18         | 38,078,700         |          |
|  | 4.01.17.01.20     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah    | Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi ke kabupaten dan monitoring/pembinaan ke desa |   | 258        | 20,448,000        | 456        | 26,752,000         | 456        | 29,427,200         | 456        | 32,369,920         | 4        |
| Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas kinerja | <b>4.01.17.02</b> | <b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> | <b>Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai</b>                           |   | <b>391</b> | <b>74,504,500</b> | <b>398</b> | <b>193,744,500</b> | <b>402</b> | <b>178,566,450</b> | <b>405</b> | <b>196,423,095</b> | <b>4</b> |
|  | 4.01.17.02.05     | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional                    | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2  | 6 | 1          | 34,300,000        | 2          | 50,500,000         | 2          | 55,550,000         | 2          | 61,105,000         |          |
|  | 4.01.17.02.07     | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                     | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor  |   | 2          | 3,000,000         | 3          | 28,900,000         | 4          | 31,790,000         | 4          | 34,969,000         |          |
|  | 4.01.17.02.09     | Pengadaan peralatan gedung kantor                        | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor   |   | 0          | 0                 | 4          | 22,500,000         | 4          | 24,750,000         | 4          | 27,225,000         |          |
|  | 4.01.17.02.22     | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                 | Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan londisi baik                                |   | 365        | 13,135,000        | 365        | 67,775,000         | 365        | 40,000,000         | 365        | 44,000,000         | 3        |
|  | 4.01.17.02.24     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang siap operasional                                 | 6 | 6          | 17,942,000        | 7          | 17,942,000         | 9          | 19,736,200         | 12         | 21,709,820         |          |
|  | 4.01.17.02.28     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor    | Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara dan siap operasional                               |   | 6          | 2,277,500         | 6          | 2,277,500          | 7          | 2,505,250          | 7          | 2,755,775          |          |



|   |                   |  |   |  |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   |
|---|-------------------|--|---|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
|   | 4.01.17.02.28     | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor   | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara dan siap operasional                                       |  | 11        | 3,850,000         | 11        | 3,850,000         | 11        | 4,235,000         | 11        | 4,658,500         |
| Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas kinerja              | <b>4.01.17.05</b> | <b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>  | <b>Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai dengan kompetensi tugas</b> |  | <b>2</b>  | <b>19,000,000</b> | <b>3</b>  | <b>30,000,000</b> | <b>4</b>  | <b>40,000,000</b> | <b>4</b>  | <b>40,000,000</b> |
|   | 4.01.17.05.03     | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                                       | Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Bintek dan menjadi terampil                                    |  | 2         | 19,000,000        | 3         | 30,000,000        | 4         | 40,000,000        | 4         | 40,000,000        |
| Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Wanaraya | <b>4.01.17.15</b> | <b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>                                    | <b>Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>   |  | <b>12</b> | <b>14,680,000</b> | <b>12</b> | <b>20,020,000</b> | <b>12</b> | <b>20,020,000</b> | <b>12</b> | <b>20,345,000</b> |
|   | 4.01.17.15.08     | Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri   | Jumlah laporan kegiatan penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan                      |  | 12        | 14,680,000        | 12        | 20,020,000        | 12        | 20,020,000        | 12        | 20,345,000        |
| Meningkatnya kualitas pelayanan public                        |                   | <b>Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>                                   | <b>Terbantunya kesejahteraan keluarga kurang mampu</b>  |  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>12</b> | <b>24,624,000</b> | <b>12</b> | <b>24,624,000</b> | <b>12</b> | <b>27,624,000</b> |
|   |                   | Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS | Terdistribusinya bantuan beras miskin ke keluarga kurang mampu                                      |  | 0         | 0                 | 12        | 24,624,000        | 12        | 24,624,000        | 12        | 27,624,000        |
| Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas kinerja              | <b>4.01.17.15</b> | <b>Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>                                       | <b>Terinformasikannya semua potensi kecamatan</b>   |  | <b>1</b>  | <b>2,500,000</b>  | <b>2</b>  | <b>24,350,000</b> | <b>2</b>  | <b>24,850,000</b> | <b>2</b>  | <b>24,850,000</b> |
|   | 4.01.17.15.12     | Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah, Industri kecil dan Industri                            | Lembaga ekonomi desa yang dibina  |  | 0         | 0                 | 1         | 21,350,000        | 1         | 21,350,000        | 1         | 21,350,000        |



|  |                   |  |   |  |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |          |
|--|-------------------|--|---|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|
|  |                   | menengah   |   |  |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |          |
|  | 4.01.17.15.12     | Penyelenggaraan pameran investasi/ promosi daerah                            | Jumlah pameran promosi hasil pembangunan daerah   |  | 1          | 2,500,000         | 1          | 3,000,000         | 1          | 3,500,000         | 1          | 3,500,000         |          |
| Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja | <b>4.01.17.16</b> | <b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>                            | <b>Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan</b>   |  | <b>2</b>   | <b>42,775,000</b> | <b>2</b>   | <b>75,260,000</b> | <b>2</b>   | <b>77,490,000</b> | <b>2</b>   | <b>77,490,000</b> |          |
|  | 4.01.17.16.11     | Pelaksanaan pelatihan Paskibraka dan upacara 17 Agustus                      | Jumlah Paskibra yang terlatih dalam pelaksanaan upacara HUT RI  |  | 1          | 42,775,000        | 1          | 51,185,000        | 1          | 53,415,000        | 1          | 53,415,000        |          |
|  | 4.01.17.16.12     | Kemah Bakti Karang Taruna  | Jumlah peserta kemah bakti karang taruna Kec. Wanaraya yang dikirim   |  | 1          | 0                 | 1          | 24,075,000        | 1          | 24,075,000        | 1          | 24,075,000        |          |
|  | 4.01.17.17        | <b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>                               | <b>Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>   |  | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>2</b>   | <b>3,950,000</b>  | <b>2</b>   | <b>3,950,000</b>  | <b>2</b>   | <b>3,950,000</b>  |          |
|  | 4.01.17.16.13     | Penyelenggaraan/ Pengiriman Atak Diang ke Kabupaten                          | Jumlah atak diang yang dikirim ke kabupaten   |  | 0          | 0                 | 2          | 3,950,000         | 2          | 3,950,000         | 2          | 3,950,000         |          |
| Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas kinerja | <b>4.01.17.18</b> | <b>Program peningkatan peran serta kesetaraan jender dalam pembangunan</b>   | <b>Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga</b>   |  | <b>240</b> | <b>15,240,000</b> | <b>240</b> | <b>18,740,000</b> | <b>240</b> | <b>18,740,000</b> | <b>240</b> | <b>18,740,000</b> | <b>2</b> |
|  | 4.01.17.18.03     | Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | Jumlah ibu-ibu yang meningkat pengetahuannya di bidang pendidikan, kesehatan/KB, keagamaan, ekonomi, sosial, KDRT dan gizi keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta |  | 240        | 15,240,000        | 240        | 18,740,000        | 240        | 18,740,000        | 240        | 18,740,000        | 2        |



|  |  |                   |   |   |  |           |                    |            |                   |            |                   |            |                   |          |
|--|--|-------------------|---|---|--|-----------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|
|  |  |                   | narkoba   |   |  |           |                    |            |                   |            |                   |            |                   |          |
|  | Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas kinerja     | <b>4.01.17.19</b> | <b>Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama</b> | <b>Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama</b> |  | <b>40</b> | <b>130,000,000</b> | <b>40</b>  | <b>34,000,000</b> | <b>40</b>  | <b>38,500,000</b> | <b>40</b>  | <b>38,500,000</b> |          |
|  |  | 4.01.17.19.01     | Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten   | Jumlah kafilah Kec. Wanaraya yang mengikuti kegiatan MTQ tingkat kabupaten                              |  | 40        | 130,000,000        | 40         | 34,000,000        | 40         | 38,500,000        | 40         | 38,500,000        |          |
|  |  | <b>4.01.17.31</b> | <b>Program peningkatan pelayanan public</b>   | <b>Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  |  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>101</b> | <b>38,190,000</b> | <b>101</b> | <b>28,190,000</b> | <b>101</b> | <b>31,190,000</b> | <b>1</b> |
|  |  | 4.01.17.31.12     | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat   | Jumlah responden yang disurvei  |  | 0         | 0                  | 100        | 13,190,000        | 100        | 13,190,000        | 100        | 16,190,000        | 1        |
|  |  | 4.01.17.31.11     | Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)  | Terlaksananya pelayanan prima   |  | 0         | 0                  | 1          | 25,000,000        | 1          | 15,000,000        | 1          | 15,000,000        |          |
| Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa | Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa | <b>4.01.17.21</b> | <b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>   | <b>Terwujudnya penetapan dokumen perencanaan daerah</b>   |  | <b>1</b>  | <b>6,000,000</b>   | <b>1</b>   | <b>22,680,000</b> | <b>1</b>   | <b>22,680,000</b> | <b>1</b>   | <b>22,680,000</b> |          |
|  |  | 4.01.17.21.09     | Penyelenggaraan musrenbang RKPD   | Jumlah laporan rencana prioritas pembangunan kecamatan  |  | 1         | 6,000,000          | 1          | 22,680,000        | 1          | 22,680,000        | 1          | 22,680,000        |          |



|               |            |   |  |  |    |           |    |             |    |             |    |             |  |       |
|---------------|------------|---|--|--|----|-----------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|-------|
|               | 4.01.17.19 | <b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>               | <b>Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa</b>                   |  | 52 | 9,228,750 | 52 | 95,683,000  | 52 | 95,683,600  | 52 | 102,183,600 |  |       |
|               |            | Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa                              | Jumlah laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa                  |  | 13 | 3,573,750 | 13 | 23,053,000  | 13 | 23,053,600  | 13 | 23,053,600  |  |       |
|               |            | Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes             | Jumlah laporan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes |  | 13 | 5,655,000 | 13 | 25,655,000  | 13 | 25,655,000  | 13 | 25,655,000  |  |       |
|               |            | Pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi di kelurahan dan pemerintahan desa | Jumlah desa dengan Administrasi yang baik  |  | 13 | 0         | 13 | 21,320,000  | 13 | 21,320,000  | 13 | 27,820,000  |  |       |
|               |            | Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Desa                       | Jumlah laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Desa           |  | 13 | 0         | 13 | 25,655,000  | 13 | 25,655,000  | 13 | 25,655,000  |  |       |
| <b>Jumlah</b> |            |   |  |  |    |           |    | 438,483,300 |    | 732,360,300 |    | 739,524,730 |  | 786,8 |

Tabel 6.2

| <b>MISI</b>            | <b>SASARAN STRATEGIS</b>        | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>PROGRAM KERJA KECAMATAN</b>    | <b>PENDANAAN INDIKATIF</b> |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Mewujudkan Peningkatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat | a. Program Pelayanan administrasi | -                          |



|                                       |  |   |   |          |
|---------------------------------------|--|---|---|----------|
| Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja   | Publik   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> <li>c. Program Peningkatan Pelayanan Publik</li> </ul> |          |
|                                       |  |   |   | -        |
|                                       |  |   | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  | APBD Kab |
|                                       |  |   | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan<br>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan   | APBD Kab |
|                                       |  |   | Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama  | APBD Kab |
|                                       |  |   | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan   | APBD Kab |
|                                       |  |   | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  | APBD Kab |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Desa | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik              | Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan daerah  | APBD Kab |
|                                       |  | Meningkatnya kualitas Laporan dan administrasi desa dengan baik | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  | APBD Kab |



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kantor Kecamatan Wanaraya harus mengacu pada penetapan indikator kinerja kecamatan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan dan Indikator Kinerja (IK) penyelenggaraan kecamatan untuk 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing penyelenggara urusan masing-masing bidang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Kecamatan Wanaraya menetapkan target dan rencana capaian IKU kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Kecamatan Wanaraya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| NO  | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017 | TARGET SASARAN Setiap Tahun |      |      |      |      | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD ( 2022) |
|-----|--|--|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|
|     |  |  | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |                                     |
| [1] | [2]  | [3]  | [4]                         | [5]  | [6]  | [7]  | [8]  | [9]                                 |
| 1.  | Indeks Kepuasan Masyarakat                         | 81   | 81                          | 82   | 83   | 84   | 85   | 85                                  |
| 2.  | Persentase desa dengan administrasi desa yang baik | 0  | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                 |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Kesimpulan**

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Kecamatan Wanaraya 2017–2022 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Wanaraya.

Dengan Melalui Rencana Strategis ini maka penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Wanaraya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memudahkan pengukuran kinerja dan antisipasi terhadap hal-hal yang diperlukan tetapi belum dapat terselenggarakan.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah dan semangat Visi Kabupaten Barito Kuala, Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat. strategis ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sekaligus pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Wanaraya Tahun 2017-2022. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta komitmen semua pihak dari pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi dan diselaraskan dengan dinamika dan perubahan yang terjadi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.



Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Untuk itu, semua pihak terkait di lingkungan Kecamatan Wanaraya agar harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan hasil (Output) yang baik pula. Kerjasama dan sinergitas yang baik sangat dibutuhkan untuk terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

## **8.2 SARAN**

Renstra ini dari sisi internal pembuatan, disadari memiliki banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi penulisan dan penjabaran materi yang tertulis di dalamnya, untuk itu diharapkan akan terus dilaksanakan monitoring dan evaluasi isi, tata cara penulisan maupun rencana kerja yang tertera di dalam penulisan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam penyusunan renstra. Selain itu dari sisi eksternal juga tentunya dalam menjalankan program kerja kecamatan harus terjadi sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan terhadap skpd di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk kedepannya lagi.

